

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan membahas tentang pembukaan kembali hubungan diplomatik antara Inggris dengan Iran pada tahun 2015 pasca putusnya hubungan bilateral kedua negara pada tahun 2011.

Inggris dan Iran sudah sejak lama menjalin hubungan bilateral, kedua Negara tersebut menjalin hubungan diplomatik yang cukup baik di berbagai bidang, namun kedua Negara tersebut sempat mengalami pemutusan hubungan diplomatik ketika revolusi islam Iran meletus. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan diplomatik kedua Negara tersebut diantaranya adalah karena adanya ancaman bom yang diterima oleh pihak kedutaan Inggris serta penahanan terhadap misionaris berpaspor Inggris di Taheeran, tidak hanya itu hubungan buruk antara kedua Negara tersebut juga kembali terjadi pada tahun 1989, pada saat itu Inggris memulangkan kedutaan besarnya yang berada di Iran. (Abdullah, 2016).

Hubungan baik antara kedua Negara sangat terlihat pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Tony Blair dan Mohammad Khatami, selama masa kepemimpinan mereka, Inggris dan Iran menjalin kerjasama yang konstruktif dan kerjasama yang menguntungkan satu sama lainnya. Sejumlah kerja sama dan upaya-upaya positive terjalin antara keduanya selama masa pemerintahan kedua pemimpin tersebut.

Pada tahun 2002 Inggris dan Iran melakukan sejumlah kerja sama yang baik, pada saat itu Menteri Luar Negeri Iran mengunjungi Inggris dan di ikuti dengan kunjungan balasan parlemen dari Inggris, dalam kunjungan tersebut kedua Negara menjalin kerja sama dalam bidang ekonomi, energi dan investasi, selain itu Inggris juga memiliki peran dalam

membasmi peredaran narkoba dari Afghanistan dan membantu Iran menangani pengungsi dari Afghanistan, begitu juga dengan kerja sama yang dilakukan dalam bidang pendidikan dan riset antar Universitas dari kedua Negara tersebut yang terjalin sangat baik, namun hubungan baik yang terjalin antara kedua Negara tersebut kembali di terjang oleh konflik, karena adanya aktivitas pengayaan nuklir yang dilakukan oleh Iran pada tahun 2002 yang membuat Inggris menaruh kecurigaan terhadap Iran.

Isu nuklir merupakan salah satu isu internasional yang menjadi perhatian dunia, khususnya dari Inggris, pada saat itu pemimpin Iran adalah Ahmadinejad, dibawah kendalinya Iran berkomitmen untuk menggunakan nuklir sebagai salah satu energi alternative Iran, dan tentunya hal tersebut mendapat tentangan dari Inggris sendiri, kengototan Iran tersebut tentunya memberikan efek kejut bagi dunia internasional. Respon Inggris dan Negara-negara Barat semakin gencar diantaranya melalui pemberitaan di media, dimana spekulasi tentang kelanjutan program nuklir Iran tersebut ramai menjadi topik pembahasan terutama setelah kemungkinan-kemungkinanyang dapat terjadi setelah pergantian Presiden.

Agenda dan tantangan yang cukup signifikan dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Iran pada masa Presiden Ahmadinejad, dapat dikatakan adalah isu nuklir Iran yang memiliki kaitan pada hubungan Inggris dengan Iran. Agenda ini juga sangat menentukan kepentingan Iran serta kemampuan Iran sendiri untuk mencapai kepentingan nasionalnya, tapi pilihan yang tersedia bagi Pemerintah Ahmadinejad untuk menghadapi manuver sangatlah terbatas. Ahmadinejad sendiri mengatakan bahwa status program nuklir Iran tersebut tidak melanggar hukum internasional dan merupakan hak sah Iran (Alfajri, 2016).

Melalui negosiasi dan diplomasi, Inggris bersama dengan Jerman dan Prancis meminta Iran untuk menghentikan program nuklirnya tersebut, namun negosiasi yang dilakukan

oleh Inggris, Jerman dan Prancis tersebut mengalami kegagalan karena Iran bersi keras untuk melanjutkan program nuklirnya, meskipun Inggris dan negara-negara tertentu telah berusaha untuk menekan IAEA (*International Atomic Energy Agency*), menjatuhkan sanksi-sanksi bahkan mengancam untuk menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan program nuklir Iran, selain itu Inggris juga menggalang aksi internasional yaitu meminta PBB dan UE memberikan sanksi terhadap Iran, Inggris juga sempat mealakukan embargo terhadap Iran serta giat mengajak Negara-negara barat lainnya untuk menghentikan program nuklir Iran tersebut, kemudian pada November 2011 Inggris dan Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru berupa pemblokiran terhadap bank-bank bahkan juga memboikot minyak Iran (Suara Pembaruan, 2012).

Kebijakan boikot tersebut mengakibatkan hubungan diplomatik kedua negara tersebut turun bahkan berada pada titik terendah. Pada November 2011 juga terjadi penyerangan terhadap salah satu kedubes Inggris, para demonstran yang sudah tidak terkendali memasuki halaman kedubes Inggris dan melakukan aksi vandalisme, menurunkan bendera Inggris, membakar satu kendaraan milik kedubes, merusak gambar ratu, meneriakkan yel-yel yang berisi kutukan terhdap Inggris bahkan melempari gedung kantor kedubes dengan menggunakan bom molotov, aksi para demonstran Iran tersebut tentunya adalah sebuah bentuk protes terhadap sanksi yang dikeluarkan oleh Inggris untuk Iran. (VOA, 2011).

Insiden tersebut tentunya memicu kemarahan dunia internasional meski pemerintah Iran telah mengakui penyesalannya atas perbuatan tersebut, kejadian tersebut langsung mendapat tanggapan dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB dan secara aklamasi mengutuk sekeras-kerasnya insiden tersebut. Sekretaris jenderal PBB juga mengaku kaget dan marah atas peristiwa tersebut, dah mengatakan agar pemerintah Iran mencegah terjadinya peristiwa tersebut terulang kembali, Menteri Amerika Serikat

yang pada saat itu adalah Hillary Clinton juga mengatakan apa yang telah dilakukan Iran tersebut adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap masyarakat internasional (Kompas, 2011).

David Cameron yang pada saat itu adalah Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa insiden tersebut adalah sebuah tindakan yang memalukan dan bahkan tidak dapat dimaafkan, David Cameron juga mengatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Iran tersebut telah melanggar konvensi Wina, karena tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap perwakilan diplomat dan tempatnya yang seharusnya mereka jaga dalam keadaan apapun (Abdullah, 2016). Inggris juga merespon perbuatan Iran tersebut dengan memulangkan diplomatnya dari Iran dan juga mengusir seluruh diplomat Iran yang berada di Inggris serta menutup kedutaan besar Iran yang ada di London, karena sudah sangat jelas dalam konvensi wina peraturan tersebut ada dan berbunyi “Any representative or official of a State or any official or other agent of an international organization of an intergovernmental character who, at the time when and in the place where a crime against him, his official premises, his private accommodation or his means of transport is committed, is entitled pursuant to international law to special protection from any attack on his person, freedom or dignity, as well as members of his family forming part of his household” (United Nations, 2005).

Pasca pemutusan hubungan diplomatik antara Inggris dan Iran tersebut tidak menunggu waktu yang lama bagi keduanya untuk memperbaiki hubungan diplomatik mereka, dimana Inggris mencoba menjalin kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Inggris untuk memulihkan hubungan diplomatiknya dengan Iran diantaranya adalah dengan cara Perdana Menteri David Cameron berusaha menjalin komunikasi dengan Hasan Rouhani yang merupakan pemimpin Iran pada saat itu melalui sambungan telepon pada November 2013, hal tersebut adalah

komunikasi pertama yang dilakukan oleh pejabat Inggris dan Iran setelah terjadinya persetujuan yang cukup signifikan antara kedua negara tersebut, kemudian pada Januari 2015 delegasi parlemen Inggris mengunjungi Iran dan membawa misi peninjauan hubungan diplomatik, hal tersebut membuahkan hasil positif karena keduanya sepakat untuk merumuskan hubungan diplomatik demi memperlancar kerja sama politik, ekonomi dan budaya masing-masing Negara (BBC, 2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang dapat diajukan adalah mengapa Inggris membuka kembali hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2015 setelah putusannya hubungan kedua negara pada tahun 2011?

C. Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, skripsi ini akan berfokus pada permasalahan mengenai pembukaan kembali hubungan diplomatik Inggris dan Iran, sehingga untuk menjawab rumusan masalah ini, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Theory*), Teori Kepentingan Nasional (*National Interest Theory*) dan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*).

1. Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Theory*)

Kebijakan politik luar negeri suatu Negara adalah seperangkat prinsip umum dan yang para pembuat keputusannya adopsi terhadap lingkungan eksternal mereka. Secara tradisional, lingkungan eksternal berarti Negara-negara lain dan kebijakan luar negerinya, kebijakan politik luar negeri lebih di bahas secara luas belakangan ini dibanding dengan awal abad, kebijakan luar negeri dulunya lebih banyak berkaitan dengan hubungan politik dan strategis antar negara,

namun sekarang interaksi ekonomi dan bukan hanya antara Negara-negara bagaikan menjadi ciri utama kegiatan kebijakan luar negeri, terlepas dari perbedaan ukuran, kekayaan, populasi dan sebagainya, Negara bagaikan yang berbeda memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dan karenanya berbagai bentuk pengambilan keputusan, banyak yang berpendapat bahwa struktur pengambilan keputusan yang berbeda mempengaruhi sifat keputusan yang di ambil sejauh ini adalah masalah lain yang kontroversi, bagaimana Negara mengambil keputusan adalah sesuatu yang tidak dapat di abaikan, analisis ini dan perbedaan antar Negara adalah sub bidang hubungan internasional yang di kenal sebagai analisi kebijakan politik luar negeri (Nicholson, 1998).

Politik Luar Negeri merupakan sebuah pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi Negara tertentu terhadap Negara lain ataupun sekelompok Negara lain, yang dimana merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu Negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu Negara dalam menjalin hubungannya dengan Negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Ada beberapa definisi politik luar negeri menurut beberapa ahli diantaranya adalah, menurut Goldstein politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman dikancah internasional, sedangkan Crabb Jr. Dalam Columbus & Wolfe, (1999: 126) mengatakan bahwa politik luar negeri terdiri atas dua elemen, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan alat-alat untuk mencapainya. Interaksi antara tujuan nasional dengan sumber-sumber untuk mencapainya merupakan subjek kenegaraan yang abadi, dan Plano dan Olton berpendapat bahwa politik luar negeri yang menegaskan bahwa definisi politik luar negeri adalah suatu

rencana atau strategi tindakan yang di buat oleh para pembuat keputusa Negara dalam menghadapi Negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional (Zaky, 2018).

Rosenau mendefinisikan politik luar negeri yaitu upaya suatu Negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan politik luar negeri di tujukan untuk mempertahankan serta memelihara kelangsungan hidup suatu Negara.

Kebijakan politik luar negeri (*foreign policy*) pada dasarnya bermula pada sebuah individu yang memiliki kepentingan nasional. Kebijakan politik luar negeri terbentuk dari beberapa pertanyaan seperti bagaimana sebuah kebijakan terbentuk, apa saja faktor-faktor yang melibatkan kebijakan tersebut, sehingga politik luar negeri ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya melainkan adanya kepentingan nasional (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976).

Menurut Cashman, faktor domestik juga mempengaruhi sebuah kebijakan politik luar negeri. Faktor domestik metupakan faktor politik yang terjadi di dalam Negara tersebut, kondisi dimana politik dan opini publik mempengaruhi kebijakan politik luar negeri, di dalam faktor domestik terdapat juga faktor lainnya diantaranya adalah kondisi ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi sebuah kebijakan luar negeri Negara tersebut, faktor ekonomi merupakan alasan utama sebuah Negara mengubah dan memperbaiki serta membuat kebijakan agar memperoleh sebuah keuntungan, selain itu juga ada ketertarikan ekonomi karena biasanya suatu Negara membuat kebijakan luar negeri dengan motiv kepentingan bangsanya (Wiranti, 2013).

Teori Politik Luar Negeri ini tentunya memiliki peranan penting dalam kebijakan yang dibuat oleh Inggris dalam membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran, karena di dalam Politik Luar Negeri ada beberapa faktor yang

terkandung, salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana faktor ekonomi dapat menjadi alasan utama suatu Negara dalam merubah atau membuat kebijakannya. Politik Luar Negeri Inggris terhadap Iran ini adalah sebuah strategi yang di gunakan oleh Inggris untuk memperbaiki keadaan ekonominya yang sempat mengalami penurunan ketika terjadi pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran, dan juga agar Inggris dapat menjalin kembali hubungan kerjasama yang konstuktif dengan Iran. Sebuah Politik Luar Negeri suatu Negara tentunya memiliki tujuan yang baik bagi kepentingan Negeranya.

2. Teori Kepentingan Nasional (*National Interest Theory*)

Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan Bangsa atau Negara dengan hal yang di cita-citakan. Dalam kepentingan nasional peran Negara sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peran penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Menurut Thomas Hobes Negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas serta berharga (Jackson & Sorensen, 2009).

Kepentingan nasional dapat dilihat dari kebutuhan suatu Negara, kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Kepentingan juga di dasari atas suatu power yang ingin diciptakan sehingga Negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan Negara agar mendapat pengakuan dari dunia. Peran suatu Negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak di pungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai Negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya, oleh karena itu kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu Negara (Sitepu, 2011).

Kindleberger berpendapat bahwa kepentingan nasional adalah hubungan antar Negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang di miliki tiap Negara dalam bereproduksi. Keunggulan komperative tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang di pilih tiap Negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai dengan kepentingan nasional, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap Negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda, demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan history yang di miliki negara tersebut. Sehingga untuk melakukan kerja sama antar Negara dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan, pencapaian kepentingan nasional dapat di laksanakan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, terlepas dari itu kembali lagi pada kebutuhan Negara itu sendiri, hal ini di dukung oleh suatu kebijakan (Shidazhari, 2016).

Hans J. Morgenthau mengatakan bahwa kepentingan nasioal merupakan kemampuan minimum Negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan Negara-negara lain (Morgenthau, Thompson, & Clinton, 2005). Dari tinjauan tersebut, para pemimpin suatu Negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap Negara lain yang bersifat kerja sama maupun konflik, konsep kepentinga nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dan isinya, konsep ini di tentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian di putuskan oleh Negara yang bersangkutan (Ronapea, 2016).

Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah Negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, Negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan Negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan sebuah tradisi politik, sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat di lihat dari cara pandang Bangsaanya yang tercipta dari karakter

manusianya, sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur Negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Donald E. Nuchterlein mengatakan bahwa kepentingan nasional adalah sebuah tujuan atau ambisi suatu Negara dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan Negara itu sendiri, Nuchterlein membagi konsep kepentingan nasional menjadi empat dimensi yaitu, kepentingan ketahanan, kepentingan yang dimaksud adalah bagaimana suatu Negara melindungi warga negaranya, sistem pemerintahan tersebut atau suatu Negara tersebut dari ancaman kekerasan fisik yang di arahkan oleh Negara lain, selanjutnya adalah kepentingan ekonomi dimana hal ini merupakan stabilitas prekonomian suatu Negara dalam interaksi dengan negara lain, kemudian ada di sebut dengan ketertiban dunia yang bertujuan menjaga hubungan politik internasional serta ekonomi internasional demi keamanan warga negara yang sedang berada di Negara lain, ketertiban dunia memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman warga negara agar dapat beraktivitas dengan baik diluar negaranya sendiri, dan yang terakhir adalah kepentingan ideologi dimana suatu Negara melakukan sebuah perlindungan terhadap nilai-nilai yang di anggap penting dan di yakini oleh warga negaranya (Nuchterlein, 1979).

Kepentingan nasional Inggris dirumuskan dalam 3 poin utama; (1) mempromosikan kemakmuran Inggris dengan meningkatkan perdagangan dan peluang investasi perusahaan-perusahaan Inggris, baik melalui kerjasama ekonomi maupun energi, (2) menjamin keamanan Inggris secara keseluruhan, (3) mempromosikan nilai-nilai yang dianut Inggris seperti HAM, demokrasi, budaya, bahasa, dan pendidikan

Sebuah Negara sebelum melakukan kerjasama dengan negara lain perlu memperhatikan sebuah keunggulan-keunggulan yang ada di dalam Negara lainnya untuk di jadikan pertimbangan ketika menjalin kerjasama, dan setiap Negara dalam mengambil keputusan tentunya memiliki

kepentingan-kepentingan di dalamnya yang ingin di capai, seperti keputusan yang dibuat oleh Inggris ketika membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian ekonomi yang di alami Inggris karena Iran menghentikan ekspor minyaknya ke Inggris, yang dimana Iran adalah salah satu Negara pengekspor minyak terbesar bagi Inggris.

3. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Graham T. Allison menyatakan ada 3 model teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), yaitu Model Aktor Rasional; Model Proses Organisasi; dan Model Politik Birokratik (Sawlani, 2018). Skripsi ini menggunakan Model Aktor Rasional.

Model Aktor Rasional ini adalah dimana politik di pandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang di lakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri di gambarkan sebagai suatu proses intelektual. Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif-alternatif itu menggunakan kriteria optimalisasi hasil. Negara sebagai aktor yang cerdas selalu mengoptimalkan hasil yang di dapat dengan cara mempertimbangkan keuntungan serta kerugian dalam pembuatan keputusan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang rasional.

Para pembuat keputusan itu digambarkan sebagai selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaiannya, mereka juga di asumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua sumber-sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Dalam model ini para pembuat kebijakan di anggap rasional dan memang cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut Allison

model ini paling sering di terapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri (Mas'ood, 1994).

Model Aktor Rasional seringkali menekankan pengambilan keputusan lebih kepada pemimpin negara atau tokoh individu. Namun, negara bukanlah sebuah entitas sederhana yang bisa semata-mata diwakilkan oleh satu individu. Dalam berbagai literasi, khususnya yang menggunakan sudut pandang Realis, negara dianggap sebagai aktor utama hubungan internasional atau dengan kata lain *the state-centric assumption* (Morgenthau, Thompson, & Clinton, 2005).

Interaksi hubungan internasional yang dilakukan Negara berlandaskan pada pemikiran rasional yang dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan nasional. Hal ini merupakan rumus pasti sejak dulu sampai sekarang. Keinginan negara untuk bertahan hidup dari ancaman-ancaman luar merupakan motif utama dari dilakukannya hubungan internasional.

Di dalam Model Aktor rasional tentunya para pengambil keputusan dalam memutuskan sesuatu memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai sesuai dengan kebutuhan bangsa dan Negaranya, di dalam Aktor Rasional ini ada pertimbangan untung dan rugi, sehingga sebelum Inggris membuat kebijakan untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran, tentunya Inggris sudah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ketika Inggris menjalin hubungan diplomatik dengan Iran dan ketika Inggris tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Iran. Inggris mengalami kerugian ekonomi karena Iran menghentikan ekspor minyaknya ke Inggris, sehingga untuk meminimalisir kerugian tersebut Inggris memutuskan untuk membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran, karena Iran sendiri adalah negara pengeksport minyak terbesar bagi Inggris.

Tabel 1.1 Kalkulasi Untung-Rugi Keputusan Inggris Membuka Kembali Hubungan Diplomatik dengan Iran

Hubungan Diplomatik Inggris-Iran	
Keuntungan Apabila dibuka Kembali	Kerugian Apabila dibuka Kembali
Menambah aliansi yang memiliki posisi strategis di regional (Timur Tengah) maupun Internasional	Keputusan Inggris membuka kembali hubungan diplomatik dengan Iran sama saja tidak mengindahkan embargo yang dilakukan bersama dengan Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini bisa menunjukkan adanya ketidaksolidan antara negara-negara Barat.
Dapat mengawasi secara langsung perkembangan nuklir di Iran	
Terhindar dari krisis minyak karena faktanya Iran menduduki urutan nomor 3 sebagai Negara penghasil minyak terbesar di Timur Tengah dan nomor 5 di dunia	
Membuka luas potensi kerjasama di Berbagai bidang	

Sumber: diambil dari berbagai sumber

Tabel 1.2 Kalkulasi Untung Rugi Tidak Membuka Kembali Hubungan Diplomatik dengan Iran

Hubungan Diplomatik Inggris-Iran	
Keuntungan Apabila Tidak dibuka Kembali	Kerugian Apabila Tidak dibuka Kembali
Inggris bisa mempertahankan hubungan baiknya dengan Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa.	Potensi ancaman senjata nuklir Iran yang dapat membahayakan keamanan Inggris
	Tidak bisa melaksanakan kerjasama dalam bentuk apapun—baik yang sudah ada maupun yang akan datang dengan Iran, mengingat Inggris adalah Negara industri tentunya memiliki kebutuhan minyak yang besar dan Iran merupakan supplier utama Inggris selama ini sehingga dengan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran menyebabkan ketahanan minyak Inggris berkurang dan rawan krisis

Sumber: diambil dari Berbagai Sumber

Kebijakan negara yang berlandaskan pada kepentingan nasional tadi dapat terpenuhi secara optimal apabila kita mengacu pada tabel diatas. Kalkulasi perbandingan keuntungan dan kerugian apabila Inggris membuka kembali kedutaan besarnya di Teheran lebih menguntungkan terutama untuk mencapai kepentingan nasional Inggris dibandingkan dengan membiarkan kantor kedutaan terus di tutup.

Dibukanya Kedutaan Besar Inggris di Teheran dapat memperlancar kerjasama bilateral kedua Negara, Inggris bisa menerima impor minyak dari Iran, melakukan kerjasama diberbagai bidang seperti pendidikan dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari mahasiswa-mahasiswi Iran yang berkuliah di Inggris. Selain itu Iran bisa menjadi sekutu Inggris yang memiliki peran vital di regional Timur Tengah, terlebih dengan kapabilitas nuklir yang dimiliki Iran.

D. Argumen Penelitian

Dari uraian latar belakang, rumusan masalah, dan merujuk pada kerangka pemikiran di atas maka dapat diambil argumen penelitian, Inggris membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran dikarenakan:

1. Untuk meminimalisir kerugian ekonomi yang di alami Inggris karena Iran menghentikan ekspor minyaknya ke Inggris pada tahun 2012.
2. Inggris mendapatkan banyak keuntungan dari pembukaan kembali Kedutaan Besar Inggris di Teheran karena Iran bisa menjadi aliansi strategis bagi Inggris di kawasan Timur Tengah.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis masalah ini maka penulis membatasi jangkauan penelitiannya, yang dimana akan di mulai dari tahun 2011 karena pada saat itu Inggris mengumumkan sanksi yang berupa pemblokiran

terhadap bank-bank dan memboikot minyak Iran. Kebijakan yang di keluarkan Inggris tersebut menyebabkan hubungan kedua negara tersebut berada pada titik terendah. Pada tahun 2011 juga terjadi penyerangan terhadap salah satu kedutaan Inggris yang pada saat itu demonstran masuk ke dalam gedung dan melakukan aksi vandalism, mengganti bendera Inggris dengan bendera Iran, merusak gambar ratu bahkan meneriakkan yel-yel yang berisi kutukan terhadap Inggris, hal tersebut dianggap telah melanggar konvensi Wina oleh Perdana Menteri David Cameron, yang dimana dalam Konvensi Wina mengatakan bahwa harus diberikannya perlindungan maksimal terhadap perwakilan diplomat dan tempatnya yang seharusnya mereka jaga dalam keadaan apapun, namun Iran melakukan hal yang sebaliknya, namun pada tahun 2013 Inggris berusaha kembali menjalin hubungannya dengan Iran, dan pada tahun 2015 telah resmi dibuka kembali hubungan diplomatik antara Inggris dengan Iran yang ditandai, sehingga topik yang akan penulis paparkan dalam skripsi ini pada tahun 2011-2015 yang dimana pada saat itu terjadi beberapa kali pemutusan hubungan diplomatik namun kembali dibuka lagi hubungan diplomatik kedua negara tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan dan pengolahan data yang tidak bergantung pada angka karena lebih menekankan analisis sosial atau kualitas sampel data yang dijadikan rujukan.

Paradigma yang digunakan adalah Studi Kasus, Rahardjo dan Gudnanto dalam buku "Pemahaman Individu Teknik Non Tes" menjelaskan bahwa Studi Kasus merupakan suatu metode untuk memahami subjek atau objek secara integratif dan komprehensif (Rahardjo & Gudnanto, 2011); Demi keperluan pengumpulan data, penulis menggunakan analisis

data sekunder dengan cara studi pustaka melalui publikasi/jurnal, buku, internet, atau media lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berhubungan dengan kasus yang penulis angkat di dapatkan dari berbagai dari beberapa tempat, seperti dari perpustakaan dan lembaga-lembaga yang terkait, diantaranya adalah:

- Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Data terkait kasus yang penulis angkat juga diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya:

- Jurnal
- Buku
- Internet/Situs Web

H. Metode Analisis

Selain dengan menggunakan metode pengumpulan data, penulis juga menggunakan metode penelitian deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran bagaimana Inggris dalam mengambil keputusan untuk membuka kembali hubungan diplomatik dengan Iran. Metode ini digunakan agar lebih obyektif dalam menggambarkan kasus yang penulis angkat, selain itu juga penulis memperoleh data dari internet yang kemudian penulis pahami dengan seksama kemudian dibahas agar mempertajam pemahaman.

I. Metode Interpretasi

Metode Interpretasi yang digambarkan dalam kasus ini merupakan sebuah analisa yang kemudian menghasilkan kesimpulan terkait latar belakang serta rumusan masalah. Data yang diperoleh dari berbagai sumber di funakan untuk menganalisis penelitian deskriptif

J. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi yang berjudul Politik Luar Negeri Inggris Membuka Hubungan Diplomatik dengan Iran Tahun 2015, penulis bertujuan untuk membahas lebih dalam tentang hubungan kedua negara tersebut sehingga penulis dapat menjelaskan alasan-alasan Inggris membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran meski sudah beberapa kali terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut.

K. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan hasil karya tulis yang teratur dan sistematis, maka penulis membagi sistematika penulisan pada karya tulis ini kedalam 5 bab yaitu:

Bab I, menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam Politik Luar Negeri Inggris Membuka Hubungan Diplomatik dengan Iran Tahun 2015, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen penelitian, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis, metode interpretasi, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, membahas tentang dinamika Inggris-Iran, sejarah, dan putusnya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 2011.

Bab III, beritis pembahasan tentang kronologi Inggris memutuskan membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran, potensi kerjasama Inggris-Iran, upaya menormalisasi hubungan kedua negara, hingga perjalanan Inggris membuka kembali hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2015.

Bab IV, menyajikan pertimbangan mengapa Inggris memilih membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Iran dan penjelasan mengenai keuntungan dari dibukanya Kedutaan Besar Inggris di Teheran.

Bab V, berisi rangkuman dari bab-bab sebelumnya yaitu kesimpulan.